



Dinas Perikanan
Kabupaten Sukabumi

2023

LAPORAN KINERJA

KOMPLEK PERKANTORAN CIMAJA JL. RAYA CISOLOK KM. 11
TELP/FAX (0266) 436423/436424
Website : <http://perikanan.sukabumikab.go.id>, e-mail :
dislutkankab.sukabumi@gmail.com
KARANGPAPAK - CISOLOK 43366

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
D. Isu Strategis	5
E. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
A. Perencanaan Strategis Tahun 2021 – 2026.....	21
B. Perjanjian Kinerja.....	32
C. Rencana Anggaran Tahun 2023.....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	42
B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target	42
C. Pengukuran Capaian Kinerja dibanding Tahun sebelumnya	44
. D. Pengukuran capaian kinerja dibanding target dalam RPJMD	45
E. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai.....	47
F. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	47
BAB IV PENUTUP.....	52
A. KESIMPULAN.....	52
B. RENCANA TINDAK LANJUT.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan,Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah.....	22
Tabel 2 <i>Cascading</i> Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023	23
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	33
Tabel 4 Anggaran Kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 (Awal).....	33
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	34
Tabel 6 Anggaran Kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 (Perubahan)	34
Tabel 7 Rencana Anggaran Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan.....	36
Tabel 8 Target Kinerja Tahun 2023.....	42
Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023.....	43
Tabel 10 Target Indikator Kinerja Program Tahun 2023	43
Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja program tahun 2023	44
Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Tahun 2023.....	44
Tabel 13 . Pengukuran Capaian Kinerja Dibanding Target RPJMD.....	45
Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2022 – 2026.....	46
Tabel 15 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2022 – 2026.....	46
Tabel 16 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	47
Tabel 17 Target dan Realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan	48
Tabel 18 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun 2023	48
Tabel 19 Analisis program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 84 Tahun 2021	8
--	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Laporan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan bahwa, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun.

Selanjutnya pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan ini, diungkapkan seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi dalam tahun 2023 yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

Dalam Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak akan kami terima sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan ke depan.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Sukabumi



NUNUNG NURHAYATI, S.Sos, K.P, M.Si
06201996012001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan *Good Governance* dilingkungan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2023.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKJ juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran dan program kegiatan. LKJ dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 **Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin**

Visi dan Misi di atas mendasari kebijakan dan program-program Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, melalui kedua landasan tersebut diharapkan akan mendorong dan memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi dengan tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata Berkelanjutan.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa pelaksanaan pembangunan perlu dikendalikan. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pasal 28 ayat 1) dan hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya. Bagi instansi pemerintah, evaluasi kegiatan tersebut merupakan cara untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akunabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP juga mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

Sebagai entitas dari Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sukabumi, Dinas Kelautan dan Perikanan berkewajiban untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan perikanan serta dalam pengelolaan anggaran keuangannya dalam rangka terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan maka dilakukan proses penilaian (akuntabilitas) kinerja instansi pemerintah selama Tahun Anggaran 2020 sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan dengan indikator kegiatan (input, output, outcome) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang sinergis, partisipatif dan akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini bertujuan untuk mengukur dan mengkomunikasikan capaian kinerja pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk/pedoman sebagaimana tersebut dalam dasar hukum penyusunan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LKj adalah sebagai sarana untuk penyampain pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk:

1 Meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih,

dan akuntabel serta mendorong tercapainya Good Governance;

2 Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder yang terkait kepada instansi pemerintah.

4 Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategik.

5 Menilai apakah pencapaian output dan outcome kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan serta waktu yang telah disediakan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 89);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 110);
17. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 84 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi;
18. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 22 tahun 2022 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

19. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 40).

D. ISU STRATEGIS

Pembangunan perikanan di Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Sumberdaya kelautan dan perikanan dalam satu dekade terakhir ini cenderung mengalami degradasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Isu strategi sdi bidang perikanan tangkap antara lain; masih beroperasinya alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, tertangkapnya ikan yang tidak layak konsumsi, penerapan teknologi penangkapan masih rendah, waktu operasi penangkapan semakin lama dan jauh, penurunan kualitas lingkungan pesisir dan laut, penegakan hukum yang masih lemah serta belum harmonisnya pemanfaatan kawasan pesisir dan laut. Di bidang perikanan budidaya, masih mengalami permasalahan dengan biaya operasional yang cukup tinggi dimana harga pakan masih mahal (60% dari biaya produksi), penerapan teknologi budidaya yang masih rendah dan pemanfaatan lahan budidaya ikan air tawar dan payau yang masih belum optimal. Kaitan dengan pengolahan dan pemasaran produk perikanan, mutu pengolahan hasil perikanan masih rendah dimana tingkat kerusakan dan kehilangan mutu ikan masih cukup tinggi, pengolah produk perikanan yang sebagian besar masih belum tersertifikasi, kualitas kemasan produk perikanan belum menarik, rendahnya pemanfaatan produk perikanan non konsumsi serta masih terbatasnya akses nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar produk perikanan terhadap informasi pasar, kemitraan usaha dan lembaga permodalan.

Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya disebabkan karena masih rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan dalam melaksanakan inovasi dan adaptasi terhadap penerapan teknologi budidaya dan penangkapan ikan yang berwawasan lingkungan. Selain hal tersebut terbatasnya ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan belum optimalnya

pemanfaatan SDA kelautan dan perikanan yang ada, yaitu baru mencapai sekitar 30 % dari potensi yang tersedia.

Dalam rangka menjawab isu-isu strategis tersebut Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan 3 (tiga) program di bidang urusan pilihan kelautan dan perikanan yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pengembangan Perikanan Budidaya dengan sasaran meningkatnya ketahanan pangan, dan peningkatan daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan dan terwujudnya sentra perikanan budidaya air tawar melalui pengembangan minapolitan.

E. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 84 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi. Adapun tugas dan fungsi Dinas Perikanan kabupaten sukabumi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang perikanan
- b. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang perikanan
- c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan, Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang perikanan
- e. Pembinaan dan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan
- f. Pemberian rekomendasi teknis untuk penerbitan perizinan oleh Dinas terkait
- g. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas

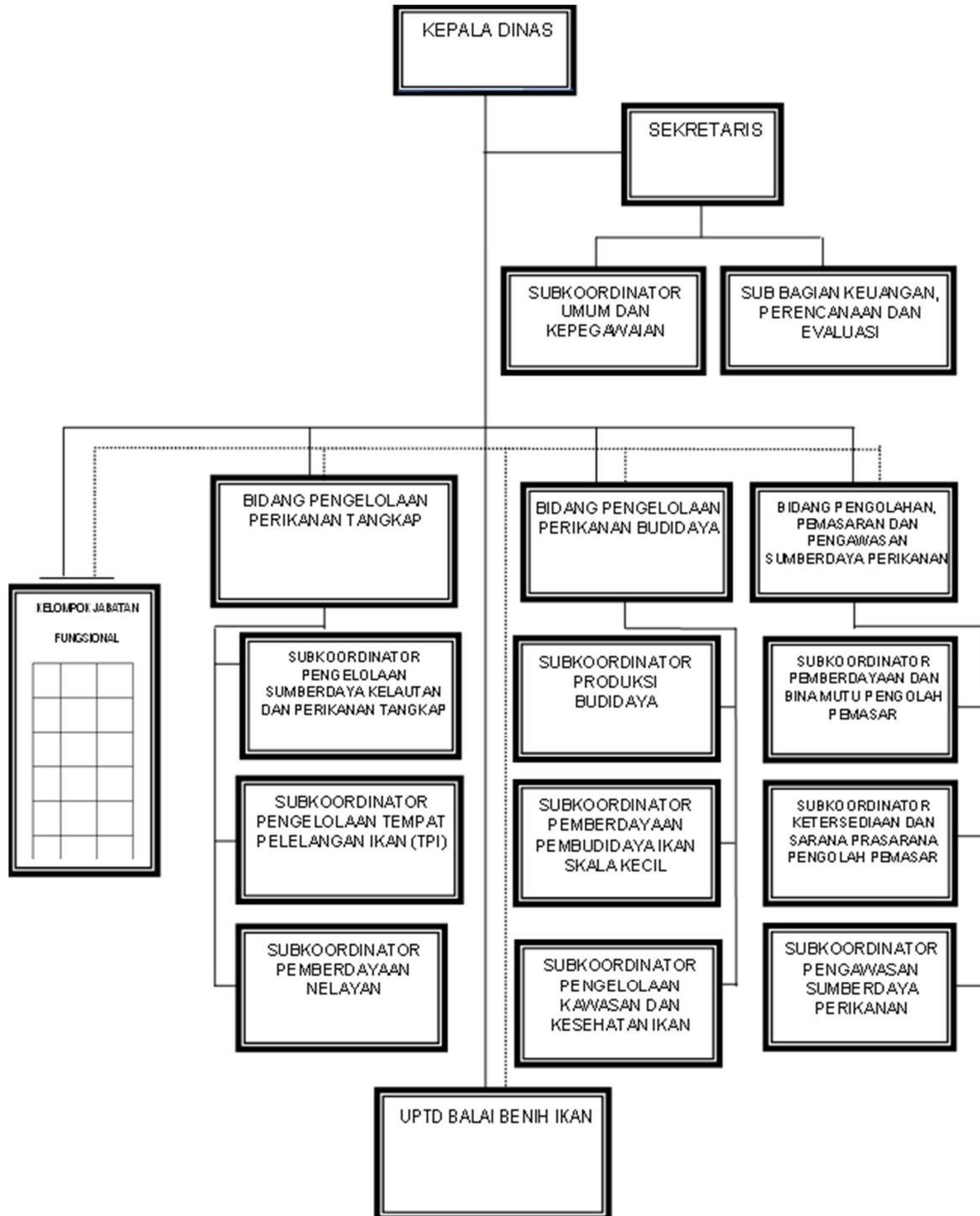
k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi selengkapnya terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
 - a) Subkoordinator Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
 - a) Subkoordinator Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tangkap
 - b) Subkoordinator Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - c) Subkoordinator Pemberdayaan Nelayan
4. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
 - a) Subkoordinator Produksi Perikanan Budidaya
 - b) Subkoordinator Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil
 - c) Subkoordinator Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
5. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
 - a) Subkoordinator Pengawasan Sumberdaya Perikanan
 - b) Subkoordinator Pemberdayaan dan Bina Mutu Pengolah Pemasar
 - c) Subkoordinator Ketersediaan dan Sarana Prasarana Pengolah Pemasar
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan (UPTD BBI),
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1 . Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 84 Tahun 2021



Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perikanan.
2. Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja sekretariat
 - b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi.
 - c. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan
 - d. Pelayanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Dinas
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang di lingkungan Dinas
 - f. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan
 - g. Pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
 - h. Pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
 - i. Pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas
 - j. Pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas
 - k. Pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas
 - l. Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - n. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
 - o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
 - p. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh :

- 2.1 *Subkoordinator Umum dan Kepegawaian* ; bertugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian, dengan fungsi :
 - a) Pengumpulan dan pengolahan data di bidang umum dan kepegawaian
 - b) Penyusunan Rencana dan Program Kerja Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian

- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian
 - d) Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan
 - e) Pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan
 - f) Penyusunan bahan neraca barang milik daerah di Lingkungan Dinas
 - g) Pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di Lingkungan Dinas
 - h) Pengelolaan Ketatausahaan dan kearsipan
 - i) Pengelolaan kepegawaian
 - j) Pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas
 - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - l) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
 - m) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas, dan
 - n) Pelaporan hasil pelaksanaan
- 2.2. *Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi* ; bertugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang keuangan, perencanaan dan evaluasi dengan fungsi :
- a) Penyusunan Rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
 - b) Pengumpulan dan Pengolahan data Keuangan, perencanaan dan evaluasi
 - c) Pengumpulan dan pengelolaan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas
 - d) Pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Dinas
 - e) Penyusunan laporan keuangan Dinas
 - f) Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Dinas
 - g) Penyusunan rencana dan program kerja Dinas
 - h) Pembinaan dan fasilitasi teknis dibidang perencanaan dan program di lingkungan Dinas
 - i) Pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan Dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan
 - j) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
 - k) Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
 - l) Penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

- m) Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta pelayanan publik di lingkungan Dinas
 - n) Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas
 - o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - p) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya
 - q) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas, dan
 - r) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
3. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang perikanan tangkap dengan melaksanakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengelolaan kelautan dan perikanan tangkap
 - b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tangkap, pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pemberdayaan nelayan
 - c. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tangkap, pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pemberdayaan nelayan
 - d. Pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan dibidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tangkap, pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pemberdayaan nelayan
 - e. Pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap skala kecil
 - f. Fasilitasi akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi nelayan skala kecil
 - g. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - h. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugasnya
 - j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dibantu oleh:

3.1 Subkoordinator Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tangkap; mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang pengelolaan

perikanan tangkap di sektor pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tangkap.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sub Koordinator Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tangkap mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tangkap
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tangkap
 - c. Penyediaan data produksi Perairan Umum Daratan
 - d. Pelaksanaan Identifikasi dan inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan tangkap
 - e. Pelaksanaan Pembinaan nelayan
 - f. Pelaksanaan Pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan tangkap
 - g. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan tangkap
 - h. Pengembangan potensi PUD unggulan
 - i. Fasilitasi sarana prasarana pengembangan Sumberdaya kelautan dan perikanan tangkap
 - j. Fasilitasi hasil riset dan inovasi pengelolaan kelautan dan perikanan tangkap
 - k. Fasilitasi informasi dan akses teknologi pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan tangkap
 - l. Pengembangan pos pendaratan ikan di PUD
 - m. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya
 - n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
 - o. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - p. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- 3.2 *Subkoordinator Pengelolaan TPI*; mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap di bidang Pengelolaan TPI. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Pengelolaan TPI mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan pengelolaan TPI

- b. penyusunan Rencana Kerja Operasional TPI
- c. Pengumpulan Bahan Kebijakan Teknis Pelelangan TPI
- d. Pengumpulan Data Produksi (Kapal, Nelayan, Alat Tangkap, Trip, Volume Ikan dan Harga Ikan)
- e. Pembinaan Petugas TPI
- f. Koordinasi Stakeholde Terkait Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
- g. Pengendalian Operasional TPI
- h. Pembinaan Bakul, Pemilik Kapal, dan Nelayan tentang pelelangan ikan
- i. Rekonsiliasi PAD Tempat Pelelangan TPI
- j. Fasilitasi Rekomendasi BBM
- k. Fasilitasi Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan
- l. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tugas Lainnya.

3.3 *Subkoordinator Pemberdayaan Nelayan* mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perikanan Tangkap di bidang Pemberdayaan Nelayan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Pemberdayaan Nelayan mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kegiatan pemberdayaan nelayan
 - b. Pengumpulan Bahan Kebijakan Teknis Pemberdayaan Nelayan
 - c. Pembinaan Nelayan terakit perijinan dan pemberdayaan nelayan
 - d. Koordinasi dengan Stakeholder terkait Perijinan Perikanan Tangkap
 - e. Proses Perijinan Perikanan Tangkap
 - f. Penandaan Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT
 - g. Fasilitasi Jaminan Sosial Nelayan
 - h. Fasilitasi Akses Sarana dan Prasarana untuk Nelayan
 - i. Pengembangan Tambak Garam Rakyat
 - j. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kemitraan Nelayan
 - k. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tugas Lainnya
4. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian fungsi dinas di Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya mempunyai Fungsi:

- a) Penyusunan Rencana dan Program Kerja Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
- b) Pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan dibidang perikanan budidaya.
- c) Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Produksi Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil dan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
- d) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Produksi Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil dan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
- e) Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya
- f) Pendampingan usaha pembudidaya ikan skala kecil
- g) Fasilitasi akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi pembudidaya ikan skala kecil
- h) Pengkajian bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha perikanan dibidang pembudidaya ikan
- i) Pengkoordinasian perekayasaan teknologi perbenihan
- j) Pengkoordinasian pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI)
- k) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- l) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya
- m) Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
- n) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya dibantu oleh :

4.1 *Subkoordinator Produksi Budidaya* mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya dibidang Produksi budidaya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sub koordinator Produksi Budidaya mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kegiatan produksi perikanan budidaya

- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis produksi perikanan budidaya
- c. Pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengendalian produksi perikanan budidaya
- d. Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan
- e. Fasilitasi Penyediaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis produksi perikanan budidaya
- g. Pelaksanaan penyusunan bahan standarisasi sarana prasarana perikanan budidaya
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya
- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas fungsinya
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

4.2 *Subkoordinator Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil*: mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana Fungsi Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya dibidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan pembudidaya
- c. Pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengendalian Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
- d. Pelaksanaan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan
- e. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan pembudidaya ikan
- f. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pembiayaan, bantuan pendanaan dan kemitraan usaha

- g. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk pembudidaya ikan
- h. Pelaksanaan fasilitasi proses kartu kusuka untuk pembudidaya ikan, pelaksanaan fasilitasi proses sertifikasi hak atas tanah untuk pembudidaya ikan dan pelaksanaan fasilitasi proses asuransi untuk pembudidaya ikan
- i. Pelaksanaan Fasilitasi Proses Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)
- j. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas, dan
- m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

4.3 *Subkoordinator Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan*: mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Fungsi Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya dibidang Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kegiatan pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
- b. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan
- c. Pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengendalian kawasan dan kesehatan ikan
- d. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tugasnya
- e. Pelaksanaan pembinaan kawasan dan kesehatan ikan
- f. Fasilitasi penataan kawasan perikanan budidaya
- g. Survey/pemeriksaan lapangan kawasan dan kesehatan ikan
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas

5. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pengelolaan, Pemasaran dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan. Untuk Melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan mempunyai Fungsi:
- a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan
 - b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang Pengawasan sumberdaya perikanan, Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan dan Ketersediaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - c. Pembinaan kelembagaan dan kemitraan; penguatan daya saing dan peningkatan nilai tambah produk dan peningkatan kehidupan nelayan pembudidaya ikan Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan sumberdaya perikanan, Pengolahan dan Mutu Hasil Produk Perikanan dan Ketersediaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - d. Pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan Pengawasan sumberdaya perikanan, Pengolahan dan Mutu Hasil Produk Perikanan dan Ketersediaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - e. Pembinaan dan pengembangan dibidang Pengawasan sumberdaya perikanan, Pengolahan dan Mutu Hasil Produk Perikanan dan Ketersediaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
 - i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dibantu oleh:

- 5.1 *Subkoordinator Pemberdayaan dan Mutu* mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Fungsi Bidang Bidang Pengelolaan, Pemasaran dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Sub Koordinator Pengolahan dan Mutu Produk Hasil

Perikanan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Pemberdayaan dan Mutu mempunyai Fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Koordinator Pemberdayaab dan Mutu
- b. Pengumpulan, pengolahan data sebagai bahan penyusunan kegiatan Pengolahan dan Mutu Produk Hasil Perikanan
- c. Pelaksanaan, pembinaan, pengembangan peningkatan dan pengelolaan program Pengolahan dan Mutu Produk Hasil Perikanan
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan persyaratan standar pada usaha pengolahan dan mutu produk hasil perikanan
- e. Melaksanakan penerapan mutu pada usaha pengolahan produk hasil perikanan
- f. Melaksanakan peningkatan mutu produk olahan dan perikanan
- g. Melaksanakan diversifikasi produk bioteknologi dan teknologi pengolahan dan Produk Hasil Perikanan
- h. Pelaksanaan Perbaikan kemasan produk perikanan
- i. Melaksanakan Peningkatan kapasitas produksi pengolahan produk hasil perikanan
- j. Melaksanakan penilaian kesesuaian produksi pengolahan produk hasil perikanan
- k. Melaksanakan bimbingan teknis pengolahan dan pengemasan produk hasil perikanan
- l. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengolahan produksi hasil perikanan
- m. Melaksanakan fungsi lain sesuai tugas dan fungsinya
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas

5.2 *Subkoordinator Ketersediaan dan Pemasaran Hasil Perikanan*: mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Fungsi Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di bidang Sub Koordinator Ketersediaan dan

Pemasaran Hasil Perikanan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Ketersediaan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai Fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Koordinator Ketersediaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- b. Pengumpulan dan Pengolahan data sebagai bahan penyusunan kegiatan bidang Ketersediaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- c. Pelaksanaan, pembinaan, pengembangan peningkatan dan pengelolaan bidang Ketersediaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan inventarisasi ketersediaan bahan baku produk olahan dan produk kemasan hasil perikanan
- e. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran perikanan
- f. Melaksanakan pemetaan dan informasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan dari daerah kabupaten/kota
- g. Melaksanakan pemantauan system rantai pasok bahan baku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- h. Melaksanakan tata kelola jaringan distribusi pengangkutan bahan baku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- i. Menyiapkan jaringan distribusi dan kerjasama ketersediaan bahan baku produksi hasil perikanan
- j. Menyiapkan infrastruktur sistem logistik bahan baku pengolahan, penyimpanan dan pemasaran hasil perikanan
- k. Melaksanakan fasilitasi akses permodalan dan Lembaga Keuangan bagi pengolah dan pemasar skala mikro dan kecil
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sistem ketersediaan bahan baku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- m. Melaksanakan fungsi lain sesuai tugas dan fungsinya
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas

5.3 *Subkoordinator Pengawasan Sumberdaya Perikanan*: mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana fungsi bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dibidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan. Untuk melaksanakan tugas pokok nya, Sub Koordinator Pengawasan Sumberdaya Perikanan mempunyai Fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Koordinator pengawasan sumberdaya perikanan
- b. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan
- c. Pelaksanaan, pembinaan, pengembangan peningkatan dan pengelolaan program pengawasan sumberdaya perikanan
- d. Penyusunan bahan fasilitasi pengawasan perizinan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya
- e. Pelaksanaan pemantauan perikanan tangkap di PUD.
- f. Pengawasan penggunaan dan peredaran obat ikan, bahan kimia, bahan biologi, pakan ikan, induk dan benih ikan di PUD
- g. Pembinaan POKMASWAS di wilayah PUD
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

Perencanaan Strategis menguraikan visi Daerah, misi yang terkait dengan organisasi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program untuk pencapaian sasaran, tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 adalah

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin” dengan Misi :

- 1) Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing
- 2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan
- 3) Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi selama periode pembangunan 2021 - 2026 adalah **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan.**

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah :

- 1) Meningkatnya produksi perikanan.

Indikator sasaran secara detail ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, kelautan, dan perikanan	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	2%	2% (8.235 Ton)	2% (8.399 Ton)	2% (8.567 Ton)	2% (8.739 Ton)	2% (8.913 Ton)
			Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	2%	2% (32.588 Ton)	2% (33.240 Ton)	2% (33.905 Ton)	2% (34.583 Ton)	2% (35.274 Ton)
			Prosentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan (%)	2%	2% (16.497 Ton)	2% (16.827 Ton)	2% (17.164 Ton)	2% (17.507 Ton)	2% (17.857 Ton)
			Prosentase penurunan tingkat pelanggaran bidang perikanan (%)	2%	2%	2%	2%	2%	2%

Tabel 2 *Cascading* Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor Pertanian dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kotora	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
										Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		
										Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		
										Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kotora	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
											Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
												Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN
												Pembiayaan, Kemitraan Usaha
										Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
										Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pendaftaran Kapal Perikanan	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN
							Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Dokumen Hasil layanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen Hasil layanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN
												<p>Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</p>
										Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil yang meningkat Kapasitasnya	<p>Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil</p> <p>Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan</p>

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN
												<p>Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil</p> <p>Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha</p> <p>Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</p>
										Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kotora	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kotora	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kotora

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN
												Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a
										Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a
												Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a
												Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a
												Pengelolaan Kesehatan Ikan dan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN
												Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
												Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
												Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
							Persentase Penurunan Pelanggaran bidang Perikanan di PUD	PENGAWASAN SUMBERDAYA KELUATAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Penurunan Pelanggaran bidang Perikanan di PUD	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN
											Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
							Presentase Peningkatan Produksi Produk Unggulan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERIKANAN	Meningkatnya Produksi Produk Unggulan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
										Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS DAERAH	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN
										Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
										Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
												Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

B. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagai bentuk komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati / Kepala Daerah) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Perikanan 2021-2026, Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Di dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 terdapat 1 (satu) indikator sasaran dan 4 (empat) indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi dalam rangka mendukung pencapaian IKU Bupati Sukabumi yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi. Sejalan dengan dinamika perubahan dalam pelaksanaan kegiatan maka perjanjian kinerja yang dibuat dan ditandatangani di awal tahun 2023 yang mengacu pada target kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 dalam perjalanannya dirubah dan disesuaikan dengan anggaran perubahan Tahun 2023.

Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 disusun berdasarkan target kinerja dokumen anggaran regular dan dokumen anggaran perubahan. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4 di bawah ini.

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
T.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan			
1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, kelautan, dan perikanan	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2%
		Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2%
		Presentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	2%
		Presentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	2%

Berdasarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, maka disusun 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Perikanan yang didukung oleh program dan kegiatan dengan besaran anggaran seperti yang tersaji pada Tabel 5 berikut.

Tabel 4 Anggaran Kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 (Awal)

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.450.106.606	Sekretariat
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 7.998.965.250	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 6.362.031.000	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.507.367.000	Bidang Pengolahan, Pemasaran dan

	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Pengawasan Sumberdaya Perikanan
Jumlah		Rp. 24.318.469.856	

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi memperoleh dukungan anggaran yang bersumber dari APBD TA.2023, Bankeu dan DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
T.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan			
1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, kelautan, dan perikanan	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2%
		Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2%
		Presentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	2%
		Presentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	2%

Tabel 6 Anggaran Kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 (Perubahan)

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.182.675.653	Sekretariat
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 8.068.965.250	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 13.491.385.000	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.637.367.000	Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
Jumlah		Rp. 32.380.392.903	

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Tabel 7 Rencana Anggaran Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
5		6	7	8	9	10	11
						32.380.392.903	31.850.975.375
01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	9.182.675.653	9.056.900.745
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100		
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100		
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100		
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100		
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100		
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100		
2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	%	100	100	118.661.000	117.702.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	54.896.000	54.566.500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1.740.000	1.710.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2.610.000	2.610.000

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1.740.000	1.515.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2.610.000	2.565.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar relaisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar relaisasi kinerja SKPD	Dokumen	5	5	39.270.000	39.069.500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dokumen	6	6	15.795.000	15.666.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	5.327.376.703	5.247.314.650
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	39	39	5.305.916.703	5.225.939.650
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	laporan	1	1	6.960.000	6.950.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran dan laporan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran	laporan	18	18	14.500.000	14.425.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang undangan	%	100	100	86.785.000	86.779.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	3.540.000	3.540.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1	83.245.000	83.239.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian daerah	%	100	100	54.000.000	49.573.722
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	39	39	54.000.000	49.573.722
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	256.792.750	256.550.950
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	11.430.000	11.430.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	219.454.150	219.257.450
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	25.908.600	25.863.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang undangan	%	100	100	258.842.800	244.198.600

	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	15	16.300.600	16.153.600
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	242.542.200	228.045.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	2.419.336.200	2.394.833.347
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Laporan	300.500.000	289.854.360
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Laporan	2.118.836.200	2.104.978.987
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	660.881.200	659.948.476
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	429.230.000	428.475.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	41	41	175.922.000	175.833.100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	107	107	55.729.200	55.639.876
	03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	2	2,10	8.068.965.250	7.824.688.830
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi Perikanan tangkap	Ton	8.399	8.399	2.352.678.000	2.335.675.000
	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan diperairan Darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	Jumlah data dan informasi Sumberdaya ikan diperairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	Dokumen	3	3	247.800.000	246.255.500
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana Usaha perikanan tangkap yang tersedia	Unit	300	718	328.878.000	327.071.600
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia	Unit	500	409	1.776.000.000	1.762.347.900
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi Perikanan tangkap	Ton	8.399	8.399	2.153.495.000	2.120.083.880
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang mendapat kegiatan pengembangan kapasitas	Orang	390	510	2.108.495.000	2.075.246.000
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	Kelompok	5	5	15.000.000	15.000.000
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	Orang	110	110	30.000.000	29.837.880

	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah produksi Perikanan tangkap	Ton	8.399	8.399	3.544.287.250	3.350.439.950
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	3	3	3.544.287.250	3.350.439.950
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi Perikanan tangkap	Ton	8.399	8.399	18.505.000	18.490.000
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 G	Jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi Buku kapal Perikanan yang menjadi kewenangan kab/kota	Dokumen	5	5	10.710.000	10.710.000
	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan	Dokumen	10	10	7.795.000	7.780.000
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	2	2,04	13.491.385.000	13.340.425.400
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	33.240	33.830	37.293.000	37.094.500
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau dampak Negatif nya Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Orang	250	100	21.034.000	20.850.000
	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau dampak Negatif nya Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Dokumen	50	22	16.259.000	16.244.500

	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	33.240	33.830	7.311.241.000	7.306.721.000
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	100	17	7.202.387.000	7.198.067.000
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Pebudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan Kecil Yang Mengikuti Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan	Kelompok	10	2	9.984.000	9.983.000
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang Terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok	10	10	76.171.000	76.016.000
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Informasi Serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	Kelompok	10	10	22.699.000	22.655.000
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	33.240	33.830	7.010.000	7.010.000
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil Bagi Pembudidaya Ikan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan	orang	100	25	7.010.000	7.010.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	33.240	33.830	6.135.841.000	5.989.599.900
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota	Dokumen	1	1	25.000.000	24.715.000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	30	10	3.842.391.000	3.718.758.500
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	73	73	2.122.800.000	2.100.578.900
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Teruji Melalui Pengujian Kesehatan Ikan	Dokumen	1	1	32.000.000	31.985.000
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Di Darat	Jumlah Pembudidaya Yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Di Darat	orang	60	60	9.960.000	9.960.000
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidaya Ikan Di Darat	Luas Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan Di Darat Yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha	500	10	103.690.000	103.602.500
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Presentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	%	2	2,02	50.000.000	50.000.000

	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kab/Kota	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kab/Kota	Dokumen	1	1	50.000.000	50.000.000
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pengawasan sumberdaya perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kab/Kota	Dokumen	1	1	35.000.000	35.000.000
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pengawasan Usaha perikanan budidaya ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kab/Kota	Dokumen	1	1	15.000.000	15.000.000
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Presentase Peningkatan Produksi Produk Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	%	2	2,05	1.587.367.000	1.578.960.400
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Produksi Pengolahan hasil perikanan	Ton	16.827	16,857	14.997.000	14.997.000
		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	14.997.000	14.997.000
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Produksi Pengolahan hasil perikanan	Ton	16.827	16.857	434.970.000	434.484.000
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko	Unit Usaha	1020	105	434.970.000	434.484.000
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Produksi Pengolahan hasil perikanan	Ton	16.827	16.857	1.137.400.000	1.129.479.400
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	52.943	39.700	50.000.000	48.568.400
	Pemberian Fasilitas Bagi pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Pelaku Usaha	100	5	1.087.400.000	1.080.911.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi memiliki 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap
2. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
3. Persentase Penurunan Pelanggaran bidang Perikanan di PUD, dan
4. Presentase Peningkatan Produksi Produk Unggulan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP).

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rencana

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi mendapatkan Total Alokasi Anggaran belanja sebesar Rp. 32.380.392.903,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 31.850.975.375,- atau 98,37%, . Anggaran ini terdiri dari Belanja Rutin sebesar Rp. 9.182.675.653,- yang terealisasikan sebesar 9.056.900.745,- atau 98,63% dan Belanja Bidang yang berhubungan langsung dengan capaian kinerja utama sebesar Rp. 23.197.717.250,- terealisasi sebesar Rp. 22.794.074.630,- atau 98,26%..

Berdasarkan kesepakatan, target kinerja pada tahun 2023 menjadi seperti disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 8 Target Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2%
		Presentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	2%
		Presentase Peningkatan Produksi Produk Unggulan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	2%

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN TARGET

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang menjadi target kinerja Dinas Perikanan yaitu meningkatnya pendapatan pelaku usaha di sector Perikanan. Capaian kinerja ketiga indicator yang diukur disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	2,10%
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2%	2,04%
		Presentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	2%	2,02%
		Presentase Peningkatan Produksi Produk Unggulan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	2%	2,05%

Secara keseluruhan, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua target tidak tercapai.

Terdapat 4 (Empat) indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program pada Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi. Ke-empat indikator tersebut mendukung terhadap keberhasilan IKU yang sudah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Indikator yang digunakan untuk penilaian kinerja. Sehingga target indicator kinerja program menjadi seperti tersaji di bawah ini.

Tabel 10 Target Indikator Kinerja Program Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Satuan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor Pertanian dan Perikanan	Ton	Produksi Perikanan Tangkap	8.399
		Ton	Produksi Perikanan Budidaya	33.240
		%	Presentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	2%
		Ton	Produksi Produk Unggulan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	16.827

Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 dapat dilihat selengkapnya pada table berikut.

Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja program tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Satuan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Prosentase Realisasi terhadap target (%)
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor Pertanian dan Perikanan	Ton	Produksi Perikanan Tangkap	8.399	8.814,5	104,95%
		Ton	Produksi Perikanan Budidaya	33.240	33.852	101,84%
		%	Presentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	2%	2,02	101%
		Ton	Produksi Produk Unggulan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	16.827	17.223,76	102,36%

Dari tabel tersebut 4 (Empat) Indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi telah mencapai target yang sudah di tetapkan, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 102,54%.

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDING TAHUN SEBELUMNYA

Untuk pengukuran capaian kinerja di bandingkan dengan tahun sebelumnya dapat di lihat dari table berikut:

Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Tahun 2022					Indikator Kinerja Tahun 2023			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	1,71%	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	2,10%
		Persentase Peningkatan	2%	1,98%		Persentase Peningkatan	2%	2,04%

Pertanian dan Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya				Produksi Perikanan Budidaya		
	Presentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	2%	-		Presentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	2%	2,02%
	Presentase Peningkatan Produksi Produk Unggulan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	2%	1,95%		Presentase Peningkatan Produksi Produk Unggulan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	2%	2,05%

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDING TARGET DALAM RPJMD

Target kinerja tahun 2023 dibandingkan terhadap target kinerja RPJMD Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 13 . Pengukuran Capaian Kinerja Dibanding Target RPJMD

No	Sasaran Strategis	Satuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor Pertanian dan Perikanan	Ton	Produksi Perikanan Tangkap	8.814,5	8.399
		Ton	Produksi Perikanan Budidaya	33.852	33.240
		%	Presentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	2,02	2%
		Ton	Produksi Produk Unggulan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	17.223,76	16.827

Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2022 – 2026

Program	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	2%	2%	2%	2%	2%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	2%	2%	2%	2%	2%
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Presentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	%	2%	2%	2%	2%	2%
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	%	2%	2%	2%	2%	2%

Tabel 15 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2022 – 2026

Program	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8.235	8.399	8.567	8.739	8.913
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	32.588	33.240	33.905	34.583	35.274
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Presentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	%	2%	2%	2%	2%	2%
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	Ton	16.497	16.827	17.164	17.507	17.857

E. ANALISIS EFIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL YANG TELAH DICAPAI

Analisis efisiensi hanya dilakukan untuk indikator kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan. Dibawah ini disajikan table analisis tingkat efisiensi sumberdaya.

Tabel 16 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFIENSI
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor Pertanian dan Perikanan	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	104,95%	96,97%	100%
		Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	101,84%	98,88%	100%
		Presentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	101%	100,00%	100%
		Presentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	102,36%	99,47%	100%

F. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Pada tahun 2023, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 32.380.392.903,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 31.850.975.375,- atau 98,37%. Alokasi belanja dialokasikan untuk belanja yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu sebesar Rp. 9.182.675.653,- terealisasi sebesar Rp. 9.056.900.745,- (98,63%)
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan pagu sebesar Rp. 8.068.965.250,- terealisasi sebesar Rp. 7.824.688.830,- (96,97%)
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan pagu sebesar Rp. 13.491.385.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.340.425.400,- (98,88%)
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan pagu sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- (100%)
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan pagu sebesar Rp. 1.587.367.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.578.960.400,- (99,47%)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupe]aten Sukabumi juga memiliki target dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD pada tahun 2023 sebesar Rp. 342.500.000,- dan dapat terealisasi sebesar 95,86% atau Rp. 328.335.580,-. Selengkapnya data mengenai PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi tersaji dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 17 Target dan Realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Jenis Belanja	Target PAD	Realisasi PAD	% Realisasi Terhadap Pagu anggaran
1	Retribusi Pelayanan Pasar Ikan	30.000.000,00	30.250.000,00	100,83%
2	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	187.500.000,00	172.540.580,00	92,02%
3	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	125.000.000,00	125.545.000,00	100,44%
	Total	342.500.000,00	328.335.580,00	95,86%

Program yang diampu oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Secara rinci Program dan Kegiatan yang diampu oleh Dinas Perikanan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 18 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun 2023

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		9.182.675.653,00	9.056.900.745,00	98,63
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.661.000,00	117.702.000,00	99,19
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.327.376.703,00	5.247.314.650,00	98,5
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	86.785.000,00	86.779.000,00	99,99
4	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	54.000.000,00	49.573.722,00	91,8
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.792.750,00	256.550.950,00	99,91
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	258.842.800,00	244.198.600,00	94,34
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.419.336.200,00	2.394.833.347,00	98,99
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	660.881.200,00	659.948.476,00	99,86

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
02.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8.068.965.250,00	7.824.688.830,00	96,97
1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.352.678.000,00	2.335.675.000,00	99,28
2 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.153.495.000,00	2.120.083.880,00	98,45
3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.544.287.250,00	3.350.439.950,00	94,53
4 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.505.000,00	18.490.000,00	99,92

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	13.491.385.000,00	13.340.425.400,00	98,88
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.293.000,00	37.094.500,00	99,47
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	7.311.241.000,00	7.306.721.000,00	99,94
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	7.010.000,00	7.010.000,00	100
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	6.135.841.000,00	5.989.599.900,00	97,62

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
04. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
1 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
05. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.587.367.000,00	1.578.960.400,00	99,47
1 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	14.997.000,00	14.997.000,00	100,00

2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	434.970.000,00	434.484.000,00	99,89
3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.137.400.000,00	1.129.479.400,00	99,30

Tabel 19 Analisis program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2020			CAPAIAN (%)	NAMA PROGRAM	KEUANGAN		CAPAIAN (%)
			SATUAN	TARGET	REALISASI			PAGU	REALISASI	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor Pertanian dan perikanan	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	2	2,10	104,95	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8.068.965.250,00	7.824.688.830,00	96,97
		Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	2	2,04	101,84	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	13.491.385.000,00	13.340.425.400,00	98,88
		Presentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	%	2	2,02	101	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	50.000.000,00	100
		Presentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	%	2	2,05	102,36	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.587.367.000,00	1.578.960.400,00	99,47

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dinas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi tahun 2021–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu upaya-upaya yang lebih konkret untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya
2. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih baik untuk produksi perikanan Tangkap dan Budidaya

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2023, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Tim TAPD terkait dukungan anggaran dan mengakses sumber pendanaan lain melalui propinsi maupun pusat
2. Berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat terkait dengan operasi penangkapan ikan di Wilayah Kabupaten Sukabumi
3. Penetapan indikator kinerja yang lebih realistis dan terukur sehingga anggaran yang ada dapat mencapai target yang ditentukan, untuk itu perlu dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan RPJMD untuk menyelaraskan Tujuan, Sasaran Daerah yang didukung program dan kegiatan.



NUNUNG NURHAYATI, S.Sos.K.P, M.Si

NIP. 196606201996012001